

# **Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak dengan Variabel Moderasi CSR (*Corporate Social Responsibility*)** Artikel

Oleh:

Dita Destanika D,

Sarwenda Biduri

Progam Studi Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2023

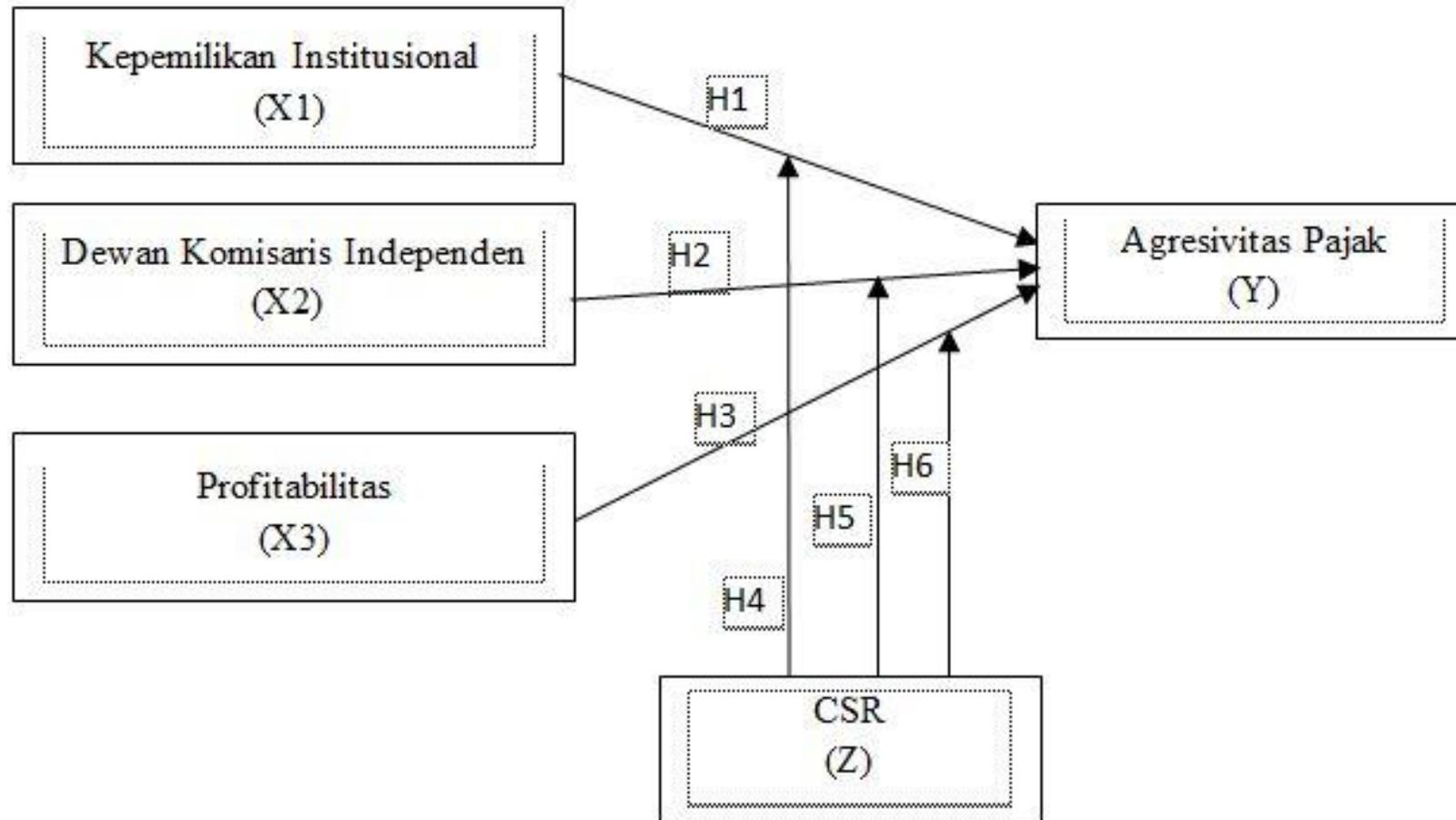
# Pendahuluan

- Pajak adalah suatu kewajiban, baik pribadi maupun badan. Hal ini dianggap sebagai beban karena mengurangi laba perusahaan. Agresivitas pajak sebagai salah satu upaya perusahaan untuk mengurangi beban tersebut. Melalui keberadaan dewan komisaris independen dan pemegang saham institusional tindakan agresivitas pajak dapat di minimalisir. Selain itu agresivitas pajak juga dilakukan saat perusahaan *profitable*, hal ini dapat mengurangi beban pajak yang muncul. CSR sebagai variabel moderasi adalah sebagai bentuk strategi dalam menumbuhkan citra positif kepada masyarakat, sebagaimana menutupi tindakan manajemen yang melakukan agresivitas pajak demi kepentingan perusahaan.
- Perusahaan properti & *real estate* merupakan salah satu industri yang memiliki dampak berganda yang penting, yakni terkait kembali pada sektor ekonomi lainnya. Berdasarkan laporan kinerja DJP yang dirilis, realisasi pajak tahun 2020 turun menjadi 1.070 T atau 89,3% dari sebelumnya 1.332,06 T pada tahun 2019 yang berarti tindakan agresivitas pajak banyak dilakukan oleh perusahaan.

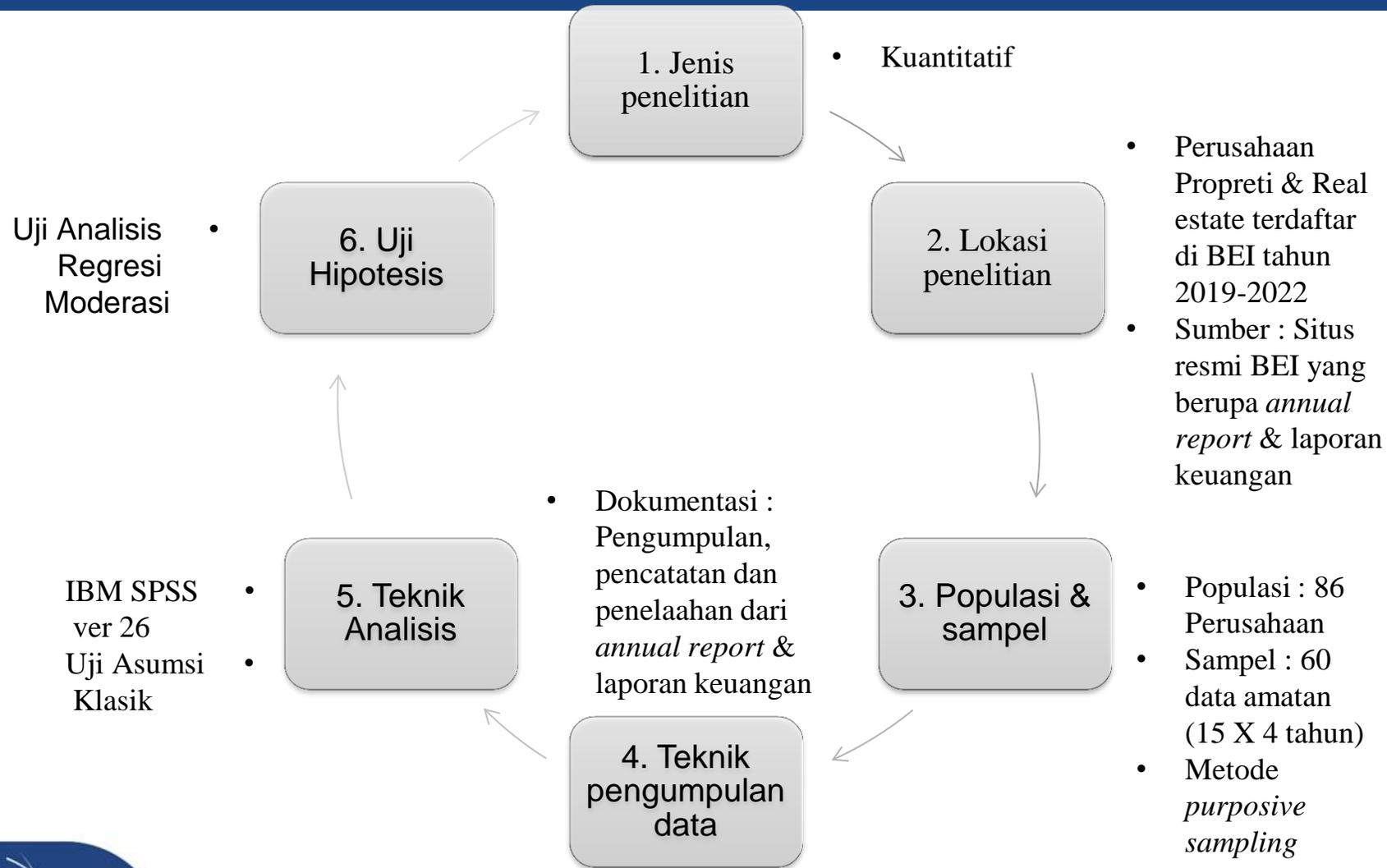
# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan CSR sebagai variabel moderasi?
5. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan CSR sebagai variabel moderasi?
6. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan CSR sebagai variabel moderasi?

# Kerangka Konseptual



# Metode



# Hasil

## Uji Analisis Deskriptif

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KINS	60	,30	,89	,5598	,19377
DKI	60	,25	,67	,4214	,13146
ROA	60	,01	,82	,4503	,17388
ETR	60	,34	,72	,5237	,09010
CSR	60	,36	,86	,6422	,11576
Valid N (listwise)	60				

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,04918796
Most Extreme Differences	Absolute	,067
	Positive	,064
	Negative	-,067
Test Statistic		,067
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

# Hasil

- Uji Multikolinearitas

## Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	KINS	,964	1,037
	DKI	,996	1,004
	ROA	,987	1,013
	CSR	,972	1,028

a. Dependent Variable: ETR

## Uji Autokorelasi

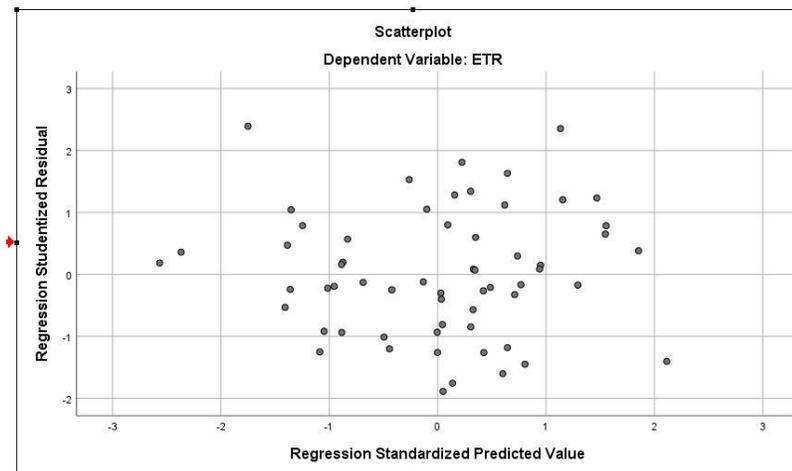
### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,838 <sup>a</sup>	,702	,668	,05190	2,043

a. Predictors: (Constant), ROA\_CSR, KINS, DKI, KINS\_CSR, ROA, DKI\_CSR

b. Dependent Variable: ETR

## Uji Heterokedastisitas



# Hasil

- Analisis Regresi Moderasi
- Uji analisis regresi moderasi menurut tabel yang mempunyai persamaan regresi sebagai berikut :
- **ETR = 0,336 - 0,347 [KINS] + 1,529 [DKI] - 0,740 [ROA] + 0,913 [KINS\*CSR] – 1,773 [DKI\*CSR] +0,783 [ROA\*CSR]**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,336	,034		9,881	,000
	KINS	-,347	,172	-,746	-2,014	,049
	DKI	1,529	,311	2,231	4,914	,000
	ROA	-,740	,187	-1,428	-3,964	,000
	KINS_CSR	,913	,268	1,293	3,404	,001
	DKI_CSR	-1,773	,441	-2,006	-4,021	,000
	ROA_CSR	,783	,288	1,059	2,721	,009

a. Dependent Variable: ETR

# Pembahasan

- **Pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak**
- Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin besar beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Kepemilikan institusional lebih mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah karena pemegang saham institusi mengetahui dampak jangka panjangnya maka dari itu dapat mencegah terjadinya anomali, salah satunya penghindaran pajak.
- **Pengaruh dewan komisaris independen terhadap agresivitas pajak**
- Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel dewan komisaris independen dapat berpengaruh terhadap agresivitas pajak baik keduanya mempunyai hubungan yang signifikan. Adapun dengan adanya komisaris independen yang berjumlah minimal 30% maka dapat ditekan suatu tindakan pengurusan perusahaan dimana perusahaan menginginkan keuntungan maksimal karena merupakan bentuk keberhasilan dalam peran manajer untuk pengurusan perusahaan.

# Pembahasan

- **Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak**
- Hasil penelitian menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga hipotesis ketiga diterima yaitu semakin menguntungkan perusahaan maka semakin keras perusahaan menerapkan penghindaran pajak. sehingga perusahaan mengelola aset dengan lebih baik.
- **Pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak dengan moderasi CSR**
- Disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan dimoderasi oleh CSR. Memang, kepemilikan institusional memiliki kekuatan untuk mengontrolnya serta mengarahkan manajer. Sehingga kemampuan dari kepemilikan institusional dalam mengontrol serta mengarahkan manajemen untuk menghindari tindakan menguntungkan perusahaan. Maka dengan program CSR hal ini dapat mempengaruhi keputusan manajerial dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

# Pembahasan

- **Pengaruh dewan komisaris independen terhadap agresivitas pajak dengan moderasi CSR**
- Disimpulkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dengan moderator CSR. Penggunaan CSR memperkuat hubungan dewan komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen terhadap manajemen dapat dibuktikan melalui program CSR sebagai keputusan manajerial dalam strategi penghindaran pajak pada perusahaan.
- **Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan moderasi CSR**
- Tanggung jawab sosial perusahaan memperkuat pengaruh antara profitabilitas dan agresivitas pajak. Perusahaan di Indonesia sudah mulai menyadari pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga semakin besar keuntungan yang diperoleh maka semakin tinggi pula nilai pelaksanaan CSR yang dicapai. Tanggung jawab sosial perusahaan juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengungguli pesaing dalam hal keuntungan. Begitu sebuah perusahaan dalam suatu industri berhasil menerapkan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan pesaing juga dapat dipaksa untuk terlibat dalam kegiatan CSR.

# Kesimpulan

- **Kesimpulan**
- Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dapat berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Oleh sebab itu, semakin tinggi kepemilikan organisasi maka semakin tinggi juga beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Kedua, Dewan Komisaris yang independen dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Dan profitabilitas mempengaruhi agresivitas pajak, sehingga perusahaan semakin agresif mempraktekkan tindakan penghindaran pajak. Selanjutnya, CSR dapat memoderasi dampak kepemilikan institusional, independensi dewan, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
- **Saran**
- Untuk penelitian lebih lanjut, dimaksudkan untuk menambah variabel bebas yang mempunyai pengaruh besar terhadap agresivitas pajak, seperti *financial distress* dan likuiditas perusahaan. Dan juga dimungkinkan untuk menggunakan waktu pencarian yang lebih lama dari waktu pencarian pada penelitian ini. Selain itu, penelitian juga bisa dilakukan di berbagai bidang yang ada, misalnya sektor pertambangan. Memang, pengungkapan CSR kepada perusahaan pertambangan masih belum sepenuhnya transparan kepada publik. Sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penghindaran pajak yang dilakukan di Indonesia.

